

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan peneliti atas pelaksanaan pengawasan Optimalisasi Penghasilan Asli Daerah (OPAD) yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2020-2021, penulis mendapatkan simpulan yang dituangkan dalam berbagai hal berikut, di antaranya:

- 1) Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) selama tahun 2020-2021 dilakukan dalam bentuk kegiatan Evaluasi OPAD dan *Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi OPAD*.
- 2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan OPAD ke 4 (empat) pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2020, Pemerintah Kota Tanjung Balai pada tahun 2021, Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2021, Pemerintah Kota Pematang Siantar pada tahun 2021, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021.
- 3) Peran pengawasan OPAD yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan memberi pengaruh signifikan terhadap total PAD yang berhasil dikumpulkan pada tahun berjalan. Pencapaian atas kenaikan 3,07% pada tahun 2020 tidak lepas dari pengaruh pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2021,

pemerintah daerah yang menjadi objek pengawasan sebagian besar mengalami penurunan PAD. Pengawasan OPAD hanya menjadi salah satu bagian dari aspek yang dapat mempengaruhi kinerja PAD masing-masing daerah sehingga tidak dapat memberi dampak secara besar terhadap kenaikan PAD. Kualitas kinerja PAD kembali ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Hasil pengawasan yang dilakukan seharusnya menjadi evaluasi bagi masing-masing pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja PAD ke depannya.